

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pernyataan	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Bagan	xii
Intisari	xiii
Abstract	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Keaslian Penelitian	11
 BAB II. LANDASAN TEORI	 14
2.1 Kedudukan Partai Politik dalam Pemerintahan yang Demokratis	14
2.2 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik : <i>Deepening Democracy</i> dan Penguatan Fungsi Partai Politik sebagai Pilar Demokrasi	23
2.3 Tata Kelola Bantuan Keuangan kepada Partai Politik : Pertanggungjawaban kepada Rakyat sebagai Pemegang Mandat Demokrasi	33
2.3.1 <i>Network Governance</i> dalam Tata Kelola Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	36

2.3.2	Transparansi dalam Tata Kelola Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	40
2.3.3	Akuntabilitas dalam Tata Kelola Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	43
2.4	Kerangka Pemikiran dan Definisi Konseptual	47
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN		50
3.1	Obyek Kajian	52
3.2	Pendekatan Penelitian	56
3.3	Unit Kajian dan Kategorisasi	57
3.4	Definisi Operasional	58
3.5	Desain Penelitian.....	60
3.5.1	Tahap Persiapan Penelitian	61
3.5.2	Tahap Pengujian Reliabilitas Penelitian	62
3.5.3	Tahap Proses dan Analisis Penelitian	63
3.5.4	Tahap Penarikan Kesimpulan	64
BAB IV. BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK : PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANGAN DAN MAKNA		65
4.1	Perkembangan Aturan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Indonesia	65
4.2	Makna Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	69
BAB V. <i>GOOD GOVERNANCE</i> DALAM TATA KELOLA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KEPADA PARTAI POLITIK		83
5.1	<i>Network Governance</i> dalam Tata Kelola Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.....	84
5.2	Transparansi dalam Tata Kelola Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	97

5.3	Akuntabilitas dalam Tata Kelola Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	116
BAB VI. PENUTUP		128
6.1	Kesimpulan	128
6.1.1	Makna Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	128
6.1.2	<i>Network Governance</i> dalam Tata Kelola Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	130
6.1.3	Transparansi dalam Tata Kelola Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	132
6.1.4	Akuntabilitas dalam Tata Kelola Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	134
6.2	Rekomendasi	136
CATATAN SETELAH PENELITIAN		140
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	: Makalah Gandjar Pranowo “Menata Kembali Partai Politik”	77
Gambar 5.1	: Format Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik sesuai Permendagri No. 77 tahun 2014	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Hasil Jajak Pendapat Kompas terhadap Wacana Peningkatan Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Siantoro, 2015)	6
Tabel 2.1	: Sejarah Perkembangan Partai Politik Indonesia 1908-2014	21
Tabel 4.1	: Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik yang Memperoleh Kursi di DPR RI TA 2015	73
Tabel 4.2	: Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik yang Memperoleh Kursi di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2015	74
Tabel 4.3	: Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik yang Memperoleh Kursi di DPRD Kota Yogyakarta TA 2015 ..	75
Tabel 5.1	: Tahapan Prosedur dalam Tata Kelola Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	101
Tabel 5.2	: Prosedur Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	108
Tabel 5.3	: Review LHP BPK terhadap dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari dana APBN TA 2014 berdasarkan kriteria pelanggaran	125
Tabel 5.4	: Review LHP BPK Perwakilan DIY terhadap dana bantuan keuangan partai politik di DIY TA 2014 berdasarkan kriteria pelanggaran	125
Tabel 5.5	: Review LHP BPK Perwakilan DIY terhadap dana bantuan keuangan partai politik di Kota Yogyakarta TA 2015 berdasarkan kriteria pelanggaran	126

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	: Kerangka Pemikiran Penelitian	48
Bagan 3.1	: Peraturan Perundangan di Bidang Tata Kelola Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	53
Bagan 3.2	: Perubahan UU No.2/2008 dalam UU No. 2/2011	54
Bagan 4.1	: Perkembangan Kebijakan Pengaturan Keuangan Partai Politik	66
Bagan 4.2	: Pengaturan Penganggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	70
Bagan 4.3	: Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik	76
Bagan 4.4	: Makna Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	77
Bagan 5.1	: Aktor dalam Tata Kelola Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (PP No.5/2009 Pasal 2 dan Permendagri No.77/2014 Pasal 2)	86
Bagan 5.2	: Peran dan Fungsi Partai Politik dalam UU No.2/2008 dan UU No.2/2011	91
Bagan 5.3	: Tanggungjawab Partai Politik dalam Tata Kelola Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	92
Bagan 5.4	: Pengajuan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	107
Bagan 5.5	: Pengaturan Keterbukaan Akses Informasi dalam Tata Kelola Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	109
Bagan 5.6	: Pelaporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	117